



A Comparative Study of The Phenomenon of “Party Switching” In The Political Systems of Indonesia and Brazil

Risyah Aprimayanti^{1*}, Jusmalia Oktaviani², Noer Apptika Fujilestari¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan; ²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi,
Indonesia

*Email korespondensi: risyah.aprimayanti@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Purpose : The purpose of this study is to compare the factors causing the phenomenon of “party switching” in the political systems of Indonesia and Brazil.

Design/methodology/approach : This research employs a comparative study method with a qualitative approach. Data were collected from various secondary sources, including journals, books, online resources, and other relevant literature. The data analysis was conducted using qualitative techniques through data collection, classification, and interpretation of information.

Findings : The results indicate that in Indonesia, the practice of party switching is driven by the existence of “political vehicles”. Meanwhile, in Brazil, there is the practice of “physiological parties” and the mechanism of a “party window”. In Indonesia, the electoral threshold plays a role in the intensity of party switching and can be used as an instrument to curb party switching practices. However, it also opens opportunities for legislators to switch from new parties to larger parties that are more likely to surpass the threshold. This is not as flexible in Brazil, which does not have regulations concerning electoral thresholds. Furthermore, the practice of party switching is inseparable from the drive to obtain political resources. In Indonesia, this is manifested through political dynasties, whereas in Brazil, it takes the form of pork barrel politics.

Practical Implication : The findings of this research can serve as an evaluation material for political parties to strengthen their internal organization and enhance the role of electoral judicial institutions.

Originality/value : The originality of this research lies in its focus: a comparison of the factors causing the “party switching” phenomenon in the Indonesian and Brazilian political systems. This study differs from previous research, which has tended to focus more on the reasons for party switching.

Keywords : Political Party, Party Switching, Indonesia, Brazil.

Paper type : Research Paper.

Studi Komparatif Fenomena "Party Switching" dalam Sistem Politik Indonesia dan Brasil

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data deskriptif seperti jurnal, internet, buku, dan sumber lain yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dengan proses pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran informasi.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan, praktik "*party switching*" di Indonesia didorong adanya "kendaraan politik", sementara di Brasil terdapat praktik "*physiological parties*" dan adanya mekanisme "Jendela Partai". Di Indonesia *electoral threshold* berperan terhadap intensitas *party switching* yang dapat digunakan sebagai instrumen menekan praktik *party switching*, namun di satu sisi bisa membuka peluang perpindahan partai dari partai baru ke besar yang berpotensi besar untuk lolos. Namun, hal tersebut tidak selonggar di Brasil yang tidak memiliki aturan terkait *electoral threshold*. Selanjutnya, praktik *party switching* tidak terlepas dari dorongan untuk memperoleh sumber daya politik. Di Indonesia dikenal dengan politik dinasti, sedangkan di Brasil praktik *pork barrel*.

Implikasi Praktis : Temuan dalam penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik untuk menguatkan sisi internal partai dan meningkatkan peran *Electoral Courts*.

Originalitas/Nilai : Originalitas penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu, perbandingan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih banyak membahas tentang alasan perpindahan partai.

Kata Kunci : Partai Politik, *Party Switching*, Brasil, Indonesia.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Fenomena perpindahan atau pergantian partai bukan hal baru dalam dunia perpolitikan. Fenomena perpindahan politik sering terjadi di berbagai belahan dunia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya, ambisi politik, perubahan ideologi partai, dan dinamika internal partai politik. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem multipartai menghadirkan banyak partai politik yang bersaing dalam arena politik. Kehadiran banyak partai tersebut membuka peluang lebih besar bagi politisi untuk bisa berpindah partai yang dianggap sesuai dengan ideologi dan ambisi politiknya sehingga lebih rentan terjadi praktik *party switching*. Di satu sisi, dominannya peran partai politik khususnya dalam parlemen, tidak hanya ikut menentukan proses legislasi, tetapi juga berperan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan serta berperan dalam pengawasan pemerintahan. Meninjau peran partai politik tersebut, makna penting hadirnya partai politik adalah sarana bagi ekspresi kepentingan masyarakat dalam asosiasi yang sedemikian luas (Aprimayanti, 2025).

Partai politik sebagai bentuk sarana dari partisipasi masyarakat yang merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi yang sehat, memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik dan membentuk arah kebijakan (Fujilestari et al., 2026). Besarnya peran partai politik tersebut, diharapkan adanya loyalitas legislator kepada partai politik yang sudah membawanya untuk menduduki jabatan yang strategis di parlemen. Dengan demikian, partai politik tidak hanya sekadar dijadikan kendaraan politik untuk mencapai kepentingan bersifat pragmatis, tetapi juga sebagai sarana yang berperan dalam perjuangan politik dan mewujudkan kepentingan masyarakat. Karena representasi politik dapat dikatakan demokratis jika kepentingan mereka yang diwakili atau terpengaruh dapat diakomodasi baik dalam pra pemilu, dalam pemilu dan juga setelah pemilu (Erwianti & Aprimayanti, 2022). Namun, fenomena perpindahan partai di Indonesia seiring perkembangannya terus mengalami peningkatan. Tidak hanya melibatkan elite partai-partai kecil, tetapi juga elite dari partai-partai besar. Sejak memasuki pemilu tahun 2004, praktik perpindahan partai di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Armunanto, 2016, p. 3).

Di Indonesia fenomena politisi yang pindah partai dari satu partai politik ke partai politik lain atau disebut “politisi kutu loncat” sudah beberapa kali terjadi. Alasan pindah partai tersebut beragam. Seperti pemecatan yang membuat politisi meninggalkan partai, pandangan politik yang tidak lagi sama, dan adanya upaya politisi dalam memperbesar kemenangan (Rahayu et al., 2024). Dengan demikian, partai yang dianggap berpotensi lolos ambang batas parlemen menjadi target. Meski demikian, sejumlah partai mengklaim bahwa penerimaan terhadap para politisi yang pindah partai tidak hanya didasarkan pada pertimbangan elektoral, tetapi juga rekam jejak kinerja dan kesamaan ideologis dalam menyikapi isu-isu terkini (Pusparisa, 2023). Beberapa contoh kasus pindah partai tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Fenomena Politisi yang Pindah Partai

No.	Nama Politisi	Partai Asal	Partai Tujuan	Keterangan
1	Robert Rouw	Partai Gerindra	Partai NasDem	Salah satu Anggota DPR RI dari Partai Gerindra sebelum akhirnya dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena pindah partai.
2	Dede Yusuf	PAN	Partai Demokrat	Berpindah dari Partai PAN ke Demokrat pada 2011.
3	Krisna Mukti	PKB	Partai NasDem	Pindah partai dari PKB ke NasDem pada pemilu legislatif 2014.
4	Ruhut Sitompul	Partai Demokrat	PDIP	Pada Agustus 2019, resmi mundur dari Demokrat dan pindah partai ke PDIP.

Sumber: Diolah dari Setyawan (2023)

Selain fenomena politisi pindah partai pada tabel 1, perpindahan partai politik terjadi menjelang pemilu tahun 2024, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Perpindahan Partai Menjelang Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Politisi	Partai Asal	Partai Tujuan	Keterangan
1	Eva Sundari	PDIP	Partai NasDem	Berpindah dari PDIP ke Partai NasDem
2	Dedi Mulyadi	Partai Golkar	Partai Gerindra	Berpindah dari Partai Golkar ke Partai Gerindra
3	Surya Tjandra	PSI	Partai NasDem	Pada Oktober 2023, Surya Tjandra memutuskan hengkang dari PSI.
4	Siti Hediati (Titiek Heriyadi Soharto)	Partai Berkarya	Partai Gerindra	Bersama Partai Berkarya, pernah maju sebagai caleg DPR RI Pileg 2019-2024 dari Dapil DIY. Namun, gagal melenggang ke Senayan, kemudian memutuskan hengkang ke Gerindra.

Sumber: Diolah dari Permana (2023)

Melihat kasus perpindahan partai di Indonesia tersebut, praktik berpindah-pindah partai adalah fenomena yang umum terjadi dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Bahkan di Indonesia dikenal dengan istilah, "Kutu loncat", untuk menggambarkan politisi yang pindah-pindah partai. Sementara negara-negara seperti India dan Malaysia menganggap praktik pindah partai

dapat mengurangi kestabilan pemerintahan. Di negara tersebut, diterbitkan undang-undang yang secara khusus mengatasi praktik pindah partai. Melalui aturan hukum tersebut secara otomatis jika politisi pindah partai dapat menurunkan politisi dari posisinya di parlemen. Peraturan yang serupa tersebut pernah ada di Indonesia pada tahun 2008, tetapi Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan terkait pemecatan anggota DPR yang berpindah partai karena menganggap sebagai pelanggaran konstitusi. Meski politisi tersebut diusung oleh partai, tetapi dipilih oleh rakyat (Rayda, 2023). Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut, belum terbentuk aturan untuk mengatasi praktik pindah partai. Akibatnya, anggota DPR tetap bisa menduduki jabatan meski sudah berpindah partai. Tetapi menurut Siti Zuhro dalam (Rayda, 2023), peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penyebab banyaknya praktik pindah partai politik di Indonesia karena lemahnya transparansi dan demokrasi internal partai politik. Partai politik seharusnya menjadi cerminan bagi praktik demokrasi yang berjalan dengan baik di sebuah negara. Tetapi kenyataannya, sistem dan proses di dalam partai politik belum berjalan demokratis.

Contoh kasus perpindahan partai atau *party switching* yang ada di Indonesia yang telah dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa praktik *party switching* di Indonesia seiring dengan perkembangannya semakin meningkat terutama ketika menjelang Pemilu. Motivasi perpindahan partai politik tersebut beragam, mulai dari ambisi pribadi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, perubahan ideologi partai, dinamika internal partai politik, dan motivasi lainnya. Menyikapi fenomena *party switching*, Indonesia hanya salah satu dari beberapa negara dengan fenomena yang serupa. Negara lainnya yang memiliki fenomena serupa adalah Brasil, yang mana fenomena perpindahan partai cukup signifikan terjadi di negara tersebut. Brasil mempunyai sistem multipartai ekstrem dengan lebih dari 30 partai di parlemen, berbeda dengan di Indonesia yang relatif lebih terkonsolidasi. Sistem partai politik di Brasil mulai muncul pada tahun 1940-an di bawah Presiden Getúlio Dorneles Vargas, yang mendirikan Partai Sosial Demokrat dan Partai Buruh Brasil untuk menyangga pemerintahannya yang melemah.

Sistem partai politik di Brasil mengalami dinamika dari masa pemerintahan militer yang ditandai adanya pembatasan partai, dengan menghapuskan semua partai politik dan menggantinya dengan satu partai pemerintah, Aliansi Pembaruan Nasional, dan satu partai oposisi, Gerakan Demokratik Brasil. Seiring dengan perkembangannya, Brasil kembali melegalkan partai politik dan berkembang menjadi sistem multipartai. Hal tersebut terjadi seiring dengan pemerintahan sipil yang dipulihkan pada tahun 1985 (*Brazil - Political Parties*, n.d.). Dalam konteks Brasil, Brasil merupakan salah satu negara dengan tingkat *party switching* tertinggi di dunia, mencapai lebih dari sepertiga anggota parlemen melakukan perpindahan partai dalam satu periode jabatan penuh. Di beberapa negara, praktik perpindahan partai tampak sebagai fenomena transisional jangka pendek yang terkait dengan proses demokratisasi serta proses pembentukan sistem kepartaian baru. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Brasil. Perpindahan partai di negara tersebut menjadi fenomena yang hampir terjadi di setiap periode jabatan anggota dewan dan berkelanjutan. Contohnya pada periode legislatif tahun (1991–1994), tercatat 262 insiden perpindahan partai,

dengan rata-rata tingkat perpindahan sebesar 0,52 per legislator per masa jabatan (Desposato et al., 2006, p. 10).

Berkaitan dengan perpindahan partai di Brasil, dikenal dengan mekanisme hukum pemilu Brasil, “Jendela Partai” yang berlaku selama 30 hari pada setiap tahun pemilu, enam bulan sebelum pemilu. Mekanisme tersebut merupakan batas waktu bagi anggota parlemen federal atau negara bagian untuk berganti partai politik tanpa kehilangan mandat karena ketidaksetiaan partai. Contohnya pada pemilu tahun 2022, tanpa kehilangan mandat mereka karena ketidaksetiaan partai, sekitar 70 anggota parlemen federal berganti partai (“Brazil: About 70 parliamentarians switched parties - The Rio Times”, 2022). Melalui mekanisme tersebut memperlihatkan longgarnya sistem kepartaian di Brasil dan mendorong tingginya angka perpindahan partai di negara tersebut.

Meninjau adanya *party switching* di beberapa negara, hal tersebut merupakan fenomena transisi jangka pendek yang terikat dengan proses demokratisasi dan pembentukan sistem kepartaian baru, atau bisa disebut penataan sistem kepartaian dalam waktu singkat. Dikemukakan oleh Desposato (2006, pp. 20-21) bahwa ada tiga motif utama mengapa di Brasil bisa terjadi *party switching* yang cukup tinggi. Pertama, legislator di Brasil cenderung pindah partai ke partai yang sudah terbentuk koalisi pemerintah pada kongres. Kedua, legislator akan berpindah ke partai lain jika mereka teralienasi secara ideologis di dalam partai mereka sendiri. Ketiga, politisi memiliki kecenderungan pindah kepada siapa yang mengusung dan memenangkan aturan pemilu di Brasil. Hal ini dikarenakan aturan pemilu di Brasil, cenderung memudahkan dan memfasilitasi partai yang mengusung dan memenangkan aturan pemilu.

Melihat latar belakang Indonesia dan Brasil yang mengalami kondisi *Party switching*, merupakan fenomena yang menarik, mengingat kedua negara ini berjauhan secara geografis dan berbeda dari banyak sisi. Kesamaan kedua negara yakni Indonesia dan Brasil sama-sama menganut sistem multipartai. Idealnya adanya sistem multipartai bisa membuka jalan lebih luas untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menekan adanya dominasi serta wewenang partai politik besar dalam pemerintahan. Namun, sistem multipartai di kedua negara sama-sama membuka ruang lebih luas terhadap praktik *party switching*. Terkait dengan fenomena *party switching* terus menjadi perhatian akademik lintas negara. Holqi et al. (2025) menunjukkan bahwa pragmatisme partai dalam pembentukan koalisi Pilkada 2024 semakin mengaburkan basis ideologis dalam menentukan dukungan politik. Sugirman et al. (2025) dan Reski et al. (2025) menyoroti ketegangan antara hak politik individu, integritas kelembagaan partai, mekanisme Pergantian Antar Waktu, dan keadilan bagi legislator yang berpindah partai. (Hayat et al., 2026) serta (Said & Yunas, 2025) juga memperlihatkan bahwa politik dinasti dan reproduksi kekuasaan elite melalui jaringan keluarga memperkuat kontrol atas rekrutmen dan karier politik. Rangkaian temuan tersebut menjelaskan bahwa perpindahan partai di Indonesia tidak cukup dipahami sebagai keputusan individual. Fenomena ini terkait dengan lemahnya pelembagaan partai, pragmatisme koalisi, dominasi elite, serta ketidakpastian mekanisme sanksi.

Urgensi komparasi Indonesia dan Brasil diperkuat oleh perkembangan kajian institusionalisasi sistem kepartaian. Kim (2025) menempatkan *party switching* sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur pelembagaan sistem partai, sedangkan Kim, Bernhard, & Hicken (2024) menunjukkan bahwa tingkat institusionalisasi memengaruhi daya tahan dan pola kompetisi politik.

Dalam konteks Amerika Latin, (Lupu, 2014) menjelaskan bahwa pengenceran merek partai melemahkan keterikatan pemilih. Couto et al. (2025) menemukan bahwa jarak ideologis, pertimbangan jabatan, dan kalkulasi suara memengaruhi perpindahan senator Brasil. Rafiq et al. (2022) menunjukkan bahwa regulasi anti-*defection* di negara lain menghadapi persoalan serupa dalam menyeimbangkan disiplin partai dan mandat individual. Selain itu penelitian oleh Negara (2020) dan Armunanto (2016) menunjukkan bahwa praktik pindah partai di Indonesia merupakan fenomena yang umum terjadi. Banyak motif yang melatarbelakangi, dimulai dari lemahnya ideologi partai, belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, mekanisme pengkaderan yang belum berjalan dengan baik, banyaknya peluang untuk karir politiknya, dan lingkungan internal partai politik. Meskipun sedikitnya sepuluh studi tersebut telah menjelaskan dimensi hukum, ideologi, institusionalisasi, dinasti, dan insentif elektoral, masih terbatas penelitian yang secara langsung membandingkan Indonesia dan Brasil melalui Teori Keagenan. Kesenjangan ini menegaskan urgensi penelitian untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara politisi sebagai agen, partai dan pemilih sebagai prinsipal, serta akses terhadap sumber daya politik membentuk *party switching* pada dua sistem multipartai yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut berdasarkan studi komparatif dan dirumuskan masalah sebagai berikut, 'bagaimana perbedaan dan persamaan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *party switching* antara Indonesia dan Brasil?' Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang membandingkan dua atau lebih fenomena untuk memperoleh pemahaman terkait realitas sosial dari sudut pandang pelaku, makna suatu konteks, deskripsi proses pembentukan atau perkembangan realitas sosial (Afrizal, 2019, p. 102). Melalui studi komparatif-kualitatif akan diperoleh hasil analisis berupa perbedaan atau persamaan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" dalam sistem politik Indonesia dan Brasil. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mencari dan mengolah data dari pengamatan, dokumen, wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya yang relevan. Oleh karena itu, data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran informasi tanpa menggunakan perhitungan angka, karena sifatnya konseptual atas suatu permasalahan (Elvera dan Astarina, 2021, p. 113).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Brasil merupakan negara dengan sistem multipartai yang memungkinkan munculnya banyak praktik *party switching*. Menurut Lupu (2013) dalam (Baker, et al., 2016), sebuah partai politik memiliki "merek politik" (*party brand*), yaitu citra yang terbentuk dari ideologi, isu yang diperjuangkan, struktur organisasi, basis pendukung, gaya kepemimpinan, dan aliansi politik. Mempertahankan citra sangat penting jika sebuah partai ingin menciptakan basis pendukung yang besar, karena pemilih mengidentifikasi dan mengevaluasi tidak hanya nama partai, tetapi juga ide-ide partai, para pemimpin, dan cara

pemerintahannya. Namun, kondisi partai politik di Indonesia dan Brasil tidak menunjukkan demikian karena tingginya praktik perpindahan partai yang didorong kepentingan atau ambisi pribadi yang menyebabkan lemahnya identitas partai politik.

Berdasarkan kondisi tersebut akan dibahas praktik "*party switching*" di Indonesia dan Brasil berdasarkan studi komparatif, yang kemudian dapat dibandingkan berupa perbedaan atau persamaan terkait faktor penyebab terjadinya fenomena "*party switching*" di Indonesia dan Brasil, berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut:

Partai Politik Indonesia dan Brasil

Di Indonesia dasar karakter partai politik dianggap sebagai "kendaraan politik" dan cenderung bersifat pragmatis dan personal. Eksistensi partai bergantung pada figur pemilik atau pendiri sehingga sering bubar atau melemah pasca-pemilu. Karakter selanjutnya yakni lemahnya ideologi, yang cenderung dianggap sebagai aksesoris, bahkan disembunyikan. Banyak partai cenderung mengikuti selera mayoritas masyarakat dibandingkan mempertahankan ideologi partai. Minimnya basis ideologi tersebut, partai politik dibangun atas agenda personal untuk mengamankan kursi kepresidenan, gubernur atau kepentingan bisnis. Partai politik di Indonesia cenderung hanya dijadikan kendaraan politik bagi para elite partai dengan tujuan mendapatkan kekuasaan, dan hanya sedikit yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat (Iskandar, 2017). Sementara di Brasil, karakter partai politik di negara tersebut mempunyai sistem multipartai ekstrem dengan lebih dari 30 partai di parlemen dan terdapat praktik "*physiological parties*".

Partai fisiologis adalah partai yang tidak memiliki ideologi atau platform kebijakan yang konsisten, tetapi bertahan dengan membangun jaringan patronase berbasis pertukaran materiil. Selanjutnya karakter partai politik di Brasil cenderung pragmatis yang mendorong politisi sering berpindah-pindah aliansi politik demi akses anggaran atau jabatan. Karakter selanjutnya menunjukkan fokus pada akses sumber daya dengan tujuan utama mendapatkan *pork-barrel*. Sehingga koalisi pemerintah terbentuk bukan karena kesamaan ideologi, tetapi negosiasi jabatan dan sumber daya. Selain itu, sistem partai politik yang longgar di Brasil mendorong politisi mudah pindah partai (*party switching*) tanpa konsekuensi elektoral. Adanya mekanisme "*Janela Partidária*" atau "Jendela Partai", mendorong terjadinya praktik perpindahan partai di negara tersebut. Mekanisme tersebut merupakan periode 30 hari di mana pejabat terpilih, yang diperoleh melalui sistem perwakilan proporsional, dapat berganti partai tanpa kehilangan mandatnya. Langkah tersebut ditetapkan sebagai cara untuk berpindah partai setelah putusan Pengadilan Tinggi Pemilihan Umum (TSE), yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Federal (STF), yang menetapkan loyalitas partai untuk posisi yang diperoleh dalam pemilihan proporsional. (Pemilu 2024: Tentang jendela partai – Pengadilan Pemilu Tinggi, n.d.)

Dalam konteks perpindahan partai, Brasil memiliki sejarah panjang pergantian partai yang sering terjadi oleh anggota legislatif yang sedang menjabat. Meskipun ada negara lain dengan tingkat pergantian yang lebih tinggi, sebagian besar negara tersebut sedang dalam masa transisi demokrasi dengan sistem partai yang terus berkembang. Dalam konteks seperti itu, pergantian berjalan seiring dengan merek partai yang kurang berkembang, keterikatan partisan pemilih yang

lebih lemah, dan norma serta prosedur rekrutmen dan hierarki yang terus berkembang. Kasus Brasil tampaknya mewakili keseimbangan jangka panjang yang stabil, dengan tingkat pergantian yang cukup stabil selama 20 tahun terakhir: sekitar sepertiga anggota parlemen telah berganti di setiap badan legislatif sejak demokratisasi (Desposato, 2009, p. 109). Paradigma partai politik Brasil selalu berada di antara kekuatan elektoral yang praktis di mana kampanye personalis, pendanaan elektoral swasta, fragmentasi tinggi, klientelisme berlaku, dan partai-partai yang memegang kendali di kongres mengatur agenda pemungutan suara, menyajikan tingkat kohesi di atas 50%, dan membentuk koalisi untuk pemerintahan (Bolognesi et al., 2023, p.2). Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dilihat karakter partai politik Indonesia dan Brasil, pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Karakter Partai Politik Indonesia dan Brasil

Aspek	<i>Physiological Parties</i> (Brasil)	Partai Kendaraan Politik (Indonesia)
Tujuan	Akses sumber daya negara (<i>pork barrel</i>)	Mengantarkan tokoh/kelembagaan ke kekuasaan
Sifat Kelembagaan	Partai "mapan" tetapi tidak ideologis	Loyalitas pada pemilik partai (oligarki)
Mobilitas Anggota	Politisi mudah pindah partai	Eksistensi tergantung kesuksesan tokoh
Relasi dengan Kekuasaan	Bertahan dengan koalisi pragmatis	Fragmentasi partai dan lemahnya institusionalisasi
Dampak Sistemik	Distorsi publik (anggaran untuk patronase) kebijakan korupsi	Fragmentasi partai dan lemahnya institusionalisasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Party Switching Indonesia dan Brasil

Meninjau fenomena praktik perpindahan partai (*Party Switching*) di beberapa negara, sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, (1) Ukuran Partai: Kandidat cenderung berpindah ke partai yang lebih besar karena ukuran partai yang besar dapat menurunkan biaya kampanye. Harapan tersebut didasarkan pada "hipotesis ambisi" dalam literatur, yang menyatakan bahwa kandidat memiliki insentif untuk bergabung dengan partai yang dapat meningkatkan prospek elektoral mereka. (2) Insentif Partai: Kandidat cenderung berpindah ke partai yang menawarkan insentif pribadi, baik yang bersifat material maupun non-material. (3) Sumber Daya Kandidat: Perpindahan partai dapat dipicu oleh jenis kandidat yang direkrut partai, contohnya seperti pengusaha yang memiliki kepentingan pribadi dalam politik karena pemerintah menentukan laju akumulasi kekayaan mereka melalui kebijakan regulasi dan perpajakan; dan (4)

Koneksi Kandidat atau koneksi sosial: Tanpa identitas partai atau reputasi ideologis yang stabil, partai harus mengandalkan perantara yang memiliki koneksi lokal serta pengetahuan lokal yang dibutuhkan untuk menargetkan manfaat klientelistik (Arriola et al., 2022).

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong perpindahan partai tersebut, pergantian partai jika dilakukan secara kolektif dalam skala besar akan mengakibatkan perpecahan dan penggabungan partai, dan dengan demikian berpotensi mengubah struktur persaingan partai dan sistem kepartaian (Kubo et al., 2022, p.254). Baik di Indonesia dan Brasil, praktik perpindahan partai terus berkembang hingga sekarang. Tingginya praktik perpindahan partai akan memberikan dampak negatif pada stabilitas politik negara dan kepercayaan publik. Di Indonesia peluang untuk partai baru eksis di parlemen sangat kecil, sedangkan di Brasil adanya mekanisme "*Janela Partidária*" atau "Jendela Partai", membuka kesempatan lebih besar untuk partai baru. Selain itu, perbedaan lainnya terlihat dari aturan *Electoral threshold*. Di Indonesia, terdapat aturan terkait *Electoral threshold*, sedangkan di Brasil tidak ada aturan formal nasional terkait *Electoral threshold*.

Electoral threshold merupakan metode ambang batas pemilihan. Konsekuensi adanya mekanisme ambang batas tersebut, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas akan tersisih. Di sisi lain, pembuat kebijakan berpendapat bahwa, melalui aturan *Electoral threshold*, bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih stabil (Taufiqurrohman, 2021). Saat ini di Indonesia, *electoral threshold* dijadikan syarat bagi partai-partai untuk menjadi peserta dalam pemilu berikutnya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang disebutkan bahwa ambang batas parlemen adalah sebesar 4% atau dengan kata lain partai politik yang memiliki suara 4% berhak untuk memperoleh kursi di parlemen. Sementara di Brasil, tidak ada ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam arti partai politik harus memenuhi persentase suara minimum untuk mendapatkan kursi di parlemen. Artinya, semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki kesempatan untuk memenangkan kursi, tidak peduli seberapa kecil persentase suara yang mereka peroleh. Menurut J. Mark Payne dalam Ambarwati & Saifulloh (2020), ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilu, merupakan batas perolehan suara untuk memenangkan pemilihan presiden, bukan ketentuan pencalonan presiden oleh partai politik. Seperti di Brasil, 50%+1 suara, yang ditegaskan sebagai syarat calon presiden untuk terpilih bukan syarat pencalonan sebagai Presiden.

Mengacu pada perbedaan kedua negara tersebut, penerapan ambang batas parlemen, dianggap mampu memperkuat sistem partai dan akuntabilitas politik. Alasan ideal tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dapat berlangsung stabil. Di Indonesia, adanya ambang batas parlemen bertujuan untuk mengurangi jumlah peserta pemilu, sehingga jumlah partai politik di lembaga perwakilan menjadi lebih terkonsolidasi (Angela, 2025). Dikaitkan dengan fenomena *party switching*, adanya aturan terkait *electoral threshold*, di satu sisi mampu berperan sebagai instrumen untuk menekan praktik-praktik perpindahan partai. Namun, di satu sisi adanya *electoral threshold* bisa memicu perpindahan partai. Adanya aturan tersebut mendorong politisi berpindah dari partai baru atau kecil ke partai besar yang berpeluang besar untuk lolos. Namun, hal tersebut tidak selonggar di Brasil. Tidak adanya aturan ambang batas di Brasil

akan menimbulkan praktik perpindahan partai semakin marak karena politisi merasa bebas berpindah partai, menimbulkan fragmentasi partai yang tinggi, ketidakstabilan dalam sistem politik, dan bisa menjadi penyebab utama krisis demokrasi berulang di Brasil.

Selain *electoral threshold* yang menjadi perbedaan terkait praktik *party switching* di Indonesia dengan Brasil, fenomena *party switching* tidak terlepas dari sumber daya politik dari kedua negara. Di Indonesia politik dinasti bisa menjadi sumber daya politik, sedangkan di Brasil adanya praktik *Pork barrel*. Teori modal sosial Pierre Bourdieu (1986) sebagaimana dikutip dalam (Fujilestari & Aprimayanti, 2026) memberikan perspektif sosiologis mengenai bagaimana relasi sosial menjadi sumber daya kekuasaan. Berdasarkan teori tersebut, politik dinasti tidak hanya mewariskan kekuasaan, tetapi juga menjadi sumber daya kekuasaan yang dapat menjadi modal dalam arena politik. Selain itu, adanya modal sosial berkontribusi terhadap praktik *pork barrel* yang dapat memperkuat jaringan kekuasaan.

Realitas di Indonesia menunjukkan, adanya politik dinasti. Kondisi tersebut bukan hanya sekadar fenomena politik, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang banyak terjadi di berbagai daerah (Maidany et al., 2024). Praktik politik dinasti tersebut akan cenderung menciptakan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi mengancam demokrasi. Ancaman tersebut didasarkan pada nilai politik dinasti yang dapat membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara adil, karena kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang (Muliono & Nasuhaidi, 2024, pp. 309-310). Menurut studi yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2019 dalam Rusmana, et al. (2023), sebanyak 40% dari 167 negara yang disurvei memiliki dinasti politik yang signifikan. Politik dinasti dianggap berkaitan dengan dominasi keluarga tertentu dalam partai politik. Hal tersebut terutama untuk menguasai modal, tata kelola partai, dan mekanisme dalam seleksi kader politik (Fathiyah, 2020). Adanya politik dinasti membuka ruang yang bebas terhadap praktik-praktik perpindahan partai, terlebih jika melihat keluarga yang terlibat dalam partai politik merupakan tokoh politik yang terkenal atau memiliki koneksi dengan tokoh politik yang memiliki basis pendukung yang kuat.

Di Indonesia berkaitan erat dengan politik dinasti, sedangkan di Brasil dikenal dengan *Secara konsep pork barrel* adalah praktik dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tertentu, biasanya dijadikan oleh petahana sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Istilah *pork-barrel* diartikan oleh Evans dalam (Rizkianata & Arifin, 2024), bahwa dana diarahkan dalam bentuk bantuan atau proyek dengan sasaran kelompok tertentu. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan bahwa *pork barrel* mungkin tidak seefektif yang diperkirakan dalam memenangkan pemilu, namun fenomena tersebut tetap menjadi bagian dari realitas politik di Brasil dan negara-negara lain.

Pork barrel juga terkait erat dengan isu-isu seperti pendanaan kampanye dan transparansi anggaran. Barry Ames (1995) dalam (Mauerberg, et al., 2024) menjelaskan pola spasial pemilu DPR Brasil tahun 1990 dan mencatat bahwa *pork barrel* banyak digunakan untuk membantu kandidat di wilayah aman aktivitas politik mereka. Pada tahun 1990-an, *pork barrel* menjadi alat yang lebih kuat untuk memperoleh suara dibandingkan pencapaian kinerja legislatif biasa, seperti pengajuan rancangan undang-undang, pengawasan terhadap lembaga eksekutif, dan indikator lainnya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Samuels (2002),

menyimpulkan bahwa, meskipun *pork* tidak memengaruhi hasil pemilu, uang memengaruhi, dan kebijakan *pork-barrel* melayani kepentingan elit bisnis lokal yang pada gilirannya memberi imbalan kepada politisi dengan sumbangan kampanye. Akibatnya ada hubungan tidak langsung antara *pork-barrelling* dan pemilihan ulang. Berdasarkan sumbangan kampanye yang diperoleh dapat membantu petahana memperoleh dukungan suara. Dukungan finansial tersebut digunakan sebagai dana untuk kampanye dan membangun citra positif yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, upaya mencari keuntungan dari keuntungan yang diperoleh harus dilengkapi dengan kemampuan membangun pencitraan politik yang baik.

Party Switching Indonesia dan Brasil Ditinjau Dari Teori Keagenan (Agency Theory)

Ditinjau dari teori keagenan (*agency theory*), menurut Eisenhardt (1989) dalam (Hendrastuti & Harahap, 2023), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. (1) Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Berdasarkan asumsi tersebut bahwa praktik *party switching* yang terjadi di Indonesia dan Brasil tidak terlepas dari dorongan motivasi pribadi guna tujuan pribadi untuk mencapai jabatan tertentu dalam politik. Memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko memungkinkan politisi dalam sebuah partai akan mencari partai politik yang sesuai ideologi atau tujuan politiknya, yang memungkinkan dijadikan sarana untuk memudahkan politisi dalam mencapai ambisi pribadi. Selain itu asumsi tentang sifat manusia cenderung menekankan pada keuntungan praktis, yaitu melalui sarana *party switching* memungkinkan politisi untuk mempertahankan karir politiknya supaya tetap aman ataupun naik. (2) Dalam konteks asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik internal partai, lemahnya ideologi dan ketidakcocokan dengan ideologi partai, merupakan pendorong maraknya praktik perpindahan partai, baik di Indonesia maupun di Brasil. Baik di Indonesia ataupun di Brasil, ideologi partai yang seharusnya menjadi karakter partai politik, justru lemah dan tidak konsisten sehingga politisi tidak memiliki loyalitas pada partai politik yang menaungi.

Politisi cenderung berpindah-pindah partai guna memprioritaskan kesempatan elektoral dan akses sumber daya politik. Selain itu politisi cenderung mementingkan keuntungan pribadi dan kepentingan daripada berpegang pada ideologi partai. (3) Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan. Kondisi tersebut mendorong praktik perpindahan partai di Indonesia dan Brasil dengan memanfaatkan sarana-sarana yang memungkinkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Seperti di Indonesia, adanya politik dinasti menjadi sarana untuk memperoleh sumber daya politik lokal karena memiliki jaringan kekuasaan dan pengaruh politik yang kuat. Sehingga dianggap mampu memberikan dukungan politik bagi politisi supaya lebih kuat. Sementara di Brasil asumsi tentang informasi terkait dengan adanya praktik *pork barrel* sebagai sarana untuk memperoleh anggaran, proyek pemerintah, dan kedekatan dengan penguasa.

Umumnya, para perwakilan rakyat dianggap menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan citra dan kekuasaan mereka di wilayah politik tertentu yang

berada di bawah pengaruh mereka, biasanya di daerah pemilihannya (Mauerberg, et al., 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Kongres Nasional Brasil telah meningkatkan kewenangannya terkait anggaran Federal. Pada tahun 2024, sekitar 30% anggaran kementerian federal akan berada di tangan anggota kongres karena adanya amandemen anggaran (Domingos, 2024). Adanya *pork barrel* tersebut akan memiliki implikasi signifikan terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Sehingga diperlukan mekanisme *check and balance* yang dapat mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana publik.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa perbandingan praktik *party switching* di Indonesia dan Brasil bisa terjadi di antaranya, karena: (1) Faktor pendorong (baik struktural maupun individual); di Indonesia faktor pendorong adanya kendaraan politik. Sementara di Brasil, partai fisiologis sebagai partai yang tidak memiliki ideologi atau platform kebijakan yang konsisten, tetapi bertahan dengan membangun jaringan patronase berbasis pertukaran materiil. (2) Faktor dari segi organisasi yang berkaitan dengan mekanisme hukum dan aturan internal partai. Lemahnya ideologi dan longgarnya aturan hukum di Indonesia dan Brasil dalam menangani *party switching*, membuat politisi cenderung bebas berpindah partai tanpa takut kehilangan kursi. (3) Faktor pendorong dari segi informasi berkaitan dengan penguasaan sumber daya politik. Di Indonesia didorong adanya politik dinasti, sementara di Brasil melalui konsep *pork barrel*, sebagai sarana memperoleh akses anggaran yang lebih besar.

Perbandingan lainnya dapat dilihat, bahwa praktik *party switching* di Indonesia terjadi pasca-pembentukan kabinet di Indonesia. Tapi, di Brasil, dapat dilihat pola temporal meningkat pasca-pemilu di Brasil. Selain itu, dampak terhadap sistem kepartaian di Indonesia yakni pada tidak stabilnya koalisi dan lemahnya akuntabilitas, sedangkan di Brasil berdampak kepada tidak stabilnya pemerintahan, praktik korupsi, dan erosi kebijakan publik. Dari aspek respons pemilih, di Indonesia *party switching* dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik atau politisi yang didukung, sedangkan di Brasil *party switching* dapat menyebabkan terjadinya defisit representasi, warga tidak percaya partai politik dan tingkat partisipasi pemilu turun.

Temuan tersebut memperluas Teori Keagenan dalam studi kepartaian. Dalam konteks Indonesia, *party switching* dapat didefinisikan sebagai perpindahan afiliasi yang dilakukan agen politik untuk mempertahankan akses pencalonan, jaringan dinasti, atau peluang elektoral ketika partai berfungsi sebagai kendaraan politik. Dalam konteks Brasil, *party switching* merupakan realokasi afiliasi untuk mengoptimalkan akses terhadap koalisi pemerintahan, jabatan, suara, dan sumber daya *pork barrel* melalui struktur partai yang terfragmentasi serta mekanisme jendela partidária. Kedua bentuk tersebut menunjukkan masalah *multiple principals*. Politisi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilih, tetapi juga kepada pimpinan partai, patron, donor, dan koalisi. Ketika informasi mengenai motif perpindahan tidak terbuka dan sanksi tidak konsisten, agen memiliki ruang untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Secara praktis, penjelasan ini mengarahkan reformasi pada transparansi alasan perpindahan, penguatan pengawasan internal, dan penyelarasan antara mandat pemilih dengan insentif partai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *party switching* di Indonesia dan Brasil berangkat dari persoalan yang sama, yaitu lemahnya ikatan ideologis, pragmatisme partai, dan kuatnya insentif untuk memperoleh kekuasaan serta sumber daya politik. Perbedaannya terletak pada jalur institusional. Di Indonesia, partai sering berfungsi sebagai “kendaraan politik”; ambang batas parlemen dapat menekan fragmentasi, tetapi sekaligus mendorong politisi dari partai kecil berpindah ke partai yang berpeluang lolos. Politik dinasti juga menyediakan jaringan dan sumber daya bagi mobilitas politik. Di Brasil, sistem multipartai yang sangat terfragmentasi, *physiological parties*, *janela partidária*, dan akses terhadap *pork barrel* menciptakan ruang perpindahan yang lebih terbuka. Ditinjau melalui Teori Keagenan, kedua pola tersebut menunjukkan bahwa politisi sebagai agen dapat mengalihkan loyalitas ketika manfaat pencalonan, jabatan, suara, atau sumber daya lebih besar daripada biaya politik dan sanksi kelembagaan.

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah. Pertama, partai politik perlu memperkuat demokrasi internal melalui kriteria rekrutmen yang terukur, kaderisasi berjenjang, penyelesaian konflik yang transparan, dan kontrak politik yang menjelaskan kewajiban kader kepada partai serta pemilih. Kedua, lembaga penyelenggara dan peradilan pemilu perlu membangun basis data terbuka mengenai riwayat perpindahan partai, alasan perpindahan, waktu perpindahan, dan konsekuensinya terhadap mandat. Indonesia perlu memperjelas hubungan antara PAW, hak partai, dan mandat pemilih tanpa menjadikan *recall* sebagai alat kontrol elite. Brasil perlu mengevaluasi dampak *janela partidária* terhadap akuntabilitas representasi dan membatasi pertukaran sumber daya yang mendorong perpindahan oportunistik. Ketiga, pembuat kebijakan perlu menilai kembali efek ambang batas dan aturan pendanaan partai agar regulasi tidak justru mendorong perpindahan menuju partai besar atau koalisi yang menguasai sumber daya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan studi dokumen, sehingga belum menangkap secara langsung pertimbangan personal politisi, negosiasi internal partai, dan persepsi pemilih terhadap perpindahan partai. Perbandingan juga berfokus pada Indonesia dan Brasil, sementara perbedaan tingkat lembaga legislatif, periode pemilu, dan jenis perpindahan belum dianalisis secara *longitudinal*. Peneliti berikutnya dapat menggunakan wawancara dengan legislator, elite partai, penyelenggara pemilu, dan pemilih; membangun basis data *party switching* lintas periode; serta menguji secara kuantitatif pengaruh ideologi, peluang pencalonan, ambang batas, jaringan dinasti, *janela partidária*, dan akses anggaran terhadap keputusan berpindah partai. Studi lanjutan juga perlu membedakan perpindahan berbasis keyakinan kebijakan dari perpindahan oportunistik agar konsekuensi normatif dan desain regulasinya dapat dirumuskan secara lebih tepat.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Implikasi praktis penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan dalam hubungan antara pemilih, partai, dan politisi. Partai dapat menerapkan publikasi kriteria pencalonan, rekam kaderisasi, mekanisme keberatan internal, serta kewajiban penjelasan terbuka ketika kader berpindah. KPU, Bawaslu, pengadilan pemilu, dan parlemen dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun pelaporan perpindahan partai yang

seragam, memperkuat pengawasan pembiayaan politik, dan mengevaluasi dampak PAW, ambang batas, serta *janela partidária* terhadap mandat pemilih. Langkah tersebut membuat pemilih dapat menilai apakah perpindahan terjadi karena perbedaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan atau karena pertukaran kepentingan jangka pendek.

Secara teoritis, penelitian ini menempatkan *party switching* sebagai bentuk masalah keagenan dengan banyak prinsipal. Temuan memperjelas bahwa *self-interest*, *bounded rationality*, konflik tujuan organisasi, dan asimetri informasi tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja melalui aturan kepartaian dan distribusi sumber daya. Di Indonesia, konsep *party switching* mengacu pada strategi agen untuk mempertahankan akses pencalonan dan jaringan kekuasaan dalam partai yang berfungsi sebagai kendaraan politik. Di Brasil, konsep tersebut mengacu pada strategi realokasi afiliasi untuk memperoleh posisi dalam koalisi, dukungan elektoral, dan akses anggaran dalam sistem yang terfragmentasi. Kontribusi ini berdampak praktis karena menunjukkan titik intervensi Teori Keagenan: memperjelas mandat, meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat monitoring, dan menaikkan biaya perpindahan oportunistik tanpa menutup kebebasan politik yang sah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang politik dan pemerintahan.

REFERENCES

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajagrafindo Persada.
- Ambarwati, S. D., & Saifulloh, M. R. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(5), 80–95. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>
- Angela, D. (2025). Comparative Approaches to Parliamentary Thresholds in Selected Countries : Lesson Learn for Indonesia Comparative Approaches to Parliamentary Thresholds in Selected Countries : Lesson Learn for Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12(2). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss2/7>
- Aprimayanti, R. (2025). Kekuatan Partai Politik Islam di Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)). *Bulletin of Asian Islamic Studies*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.51278/bais.v2i1.1764>
- Armunanto, A. A. (2016). Perpindahan Partai Dan Efeknya Terhadap Sistem Kepartaian. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/102501-ID-perpindahan-partai-dan-efeknya-terhadap.pdf>
- Arriola, L. R., Choi, D. D., Davis, J. M., Phillips, M. L., & Rakner, L. (2022). Paying to party: Candidate resources and party switching in new democracies. *Party Politics*, 28(3), 507–520. <https://doi.org/10.1177/1354068821989563>
- Baker, A., Sokhey, A. E., Ames, B., & Rennó, L. R. (2016). The dynamics of partisan identification when party brands change: The case of the Workers Party in Brazil. *The Journal of Politics*, 78(1). <https://doi.org/10.1086/683609>

- Bolognesi, B., Ribeiro, E., & Codato, A. (2023). A New Ideological Classification of Brazilian Political Parties. *DADOS, Rio de Janeiro*, vol.66 (2): e20210164, 2023. <https://doi.org/10.1590/dados.2023.66.2.303x>
- Brazil - Political Parties, Democracy, Elections | Britannica. (n.d.). Diakses dari <https://www.britannica.com/place/Brazil/Political-parties>
- Couto, L., Lopes, A. V., Albala, A., & Paley, V. R. (2025). Party Switching in Elected Upper Chambers: The Case of the Brazilian Senate. *Political Studies Review*, 23(2), 589–607. <https://doi.org/10.1177/14789299241289757>
- Desposato, S. (2009). Party switching in Brazil: Causes, effects, and representation. *Political Parties and Legislative Party Switching*, 109–144. https://doi.org/10.1057/9780230622555_5
- Desposato, S. W. (2006). Parties for rent? Ambition, Ideology, and Party Switching in Brazil's Chamber of Deputies. *American Journal of Political Science*, 50(1), 62–80. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00170.x>
- Domingos, A. (2024, 23 April). *Let them eat bacon? Exploring the subnational positive effects of pork barrel politics in the Brazilian context*. Diakses dari <https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/let-them-eat-bacon-exploring-the-subnational-positive-effects-of-pork-barrel-poli>
- Elvera & Astarina. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit Andi.
- Erwianti, A., & Aprimayanti, R. (2022). Aktor Kritis Perempuan dalam Pembahasan RUU PKS di DPR Periode 2014–2019. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 226–246. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5517>
- Fathiyah, W. (2020, 5 Agustus). Politik Dinasti di Pilkada, Refleksi Praktik Dinasti Partai Politik. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/politik-dinasti-di-pilkada-refleksi-praktik-dinasti-partai-politik/5530642.html>
- Fujilestari, N. A., & Aprimayanti, R. (2026). Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Memobilisasi Pemilih Perempuan Di Jawa Barat (Analisis Modal Sosial Pierre Bordieu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12, 229–236. <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5888>
- Fujilestari, N. A., Siddha, A., & Aprimayanti, R. (2026). Partisipasi Generasi Milenial Pemilihan Umum 2024 dalam Mengawasi Tahapan. *Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial*, 2(1), 56–64. <https://doi.org/10.65980/journalkips.v2i1.92>
- Hayat, M. A., Rifani, A., Felicia, I., Iqbal, M., & Putri, S. I. (2026). Party Dynasty: A Case Study of Nepotism in the Upper Echelons of Party Leadership. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 5(4), 821–828. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/esaprom/article/view/7861>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110–130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Iskandar, D. (2017). Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik Di Indonesia Pasca Soeharto. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1632>

- Kim, W. (2025). Measuring Party System Institutionalization in Democracies. *Party Politics*, 31(1), 3–14. <https://doi.org/10.1177/13540688231211241>
- Kim, W., Bernhard, M., & Hicken, A. (2024). Party System Institutionalization and the Durability of Competitive Authoritarian Regimes. *European Journal of Political Research*, 63(4), 1374–1396. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12655>
- Kubo, H., Matsumoto, T., & Yamamoto, K. (2022). Party switching and policy disagreement: Scaling analysis of experts' judgment. *Japanese Journal of Political Science*, 23(3), 254–269. <https://doi.org/10.1017/S1468109922000160>
- Latin America News. (2022, 5 April). Brazil: About 70 parliamentarians switched parties - The Rio Times. Diakses dari https://www.riotimesonline.com/brazil-news/brazil/brazil-about-70-parliamentarians-switched-parties/?utm_source
- Lupu, B. N. (2014). *Brand Dilution and the Breakdown of Political Parties in Latin America*. 4(4), 561–602. <https://doi.org/10.1017/S0043887114000197>
- Maidany, R., Faisal Husna, M., Lili Winarti, S., Harahap, N. (2019). Politik Dinasti Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13–24. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> ISSN: 2987-9752
- Mauerberg Jr., A., Oliveira, R. L. de, & Guerreiro, J. (2024). Political Support for Sale: Cabinet Appointments and Public Expenditures in Brazil. *Brazilian Political Science Review*, 18, 1–34. <https://doi.org/10.1590/1981-3821202400010001>
- Muliono dan Nasuhaidi. (2024). Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024 : Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9(4), 307–313. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/4362/2308>
- Negara, S. H. M. (2020). Perilaku 'Lompat Pagar' Politisi Menjelang Pemilu Legislatif 2014 Di Jawa Tengah. *E-Journal UNDIP*, 4(1), 75–84. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27335/23867>
- Pemilu 2024: Ketahui semua yang perlu Anda ketahui tentang jendela partai – Pengadilan Pemilu Tinggi. (2024). Diakses dari <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Janeiro/eleicoes-2024-confira-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-janela-partidaria>
- Permana, R. H. (2023, 16 Mei). Deretan Politikus Lompat Partai Jelang Pemilu 2024 - Halaman 2. Diakses dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6722825/deretan-politikus-lompat-partai-jelang-pemilu-2024?page=2>
- Pusparisa, Y. D. R., & Rahayu, K. Y. (2023, 12 Mei). Tak Hanya demi Kursi, Politisi Pindah Partai Diklaim karena Alasan Ideologis. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/tak-hanya-demi-kursi-politisi-pindah-partai-diklaim-karena-alasan-ideologis>
- Rafiq, W., Aziz Rana, F., & Rafique, W. (2022). Securing Parliamentary Party Allegiance through Anti Defection Laws in Pakistan: A Legislative and Judicial Discourse. *Journal of Development and Social Sciences*, 3(3), 361–371. [https://doi.org/10.47205/jdss.2022\(3-III\)35](https://doi.org/10.47205/jdss.2022(3-III)35)
- Rahayu, R., Hasan, A. A., Reliubun, I., Firmansyah, M. J., Ayu, T. (2024, 18 Januari). Tak Hanya Maruarar Sirait, Inilah Sederet Kader PDIP yang Hengkang Jelang Pemilu 2024 | tempo.co. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/tak-hanya-maruarar-sirait-inilah-sederet-kader-pdip-yang-hengkang-jelang-pemilu-2024-96544>

- Rayda, N. (2023, 29 Oktober). *Why political party-hopping is rampant in Indonesia and can anything be done about it* - CNA. Diakses dari <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-election-party-hopping-politicians-3877516>
- Reski, Ardiansyah, & Winstar, Y. N. (2025). Pemberhentian Anggota DPRD karena Pindah Partai Politik dalam Perspektif Keadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 244–264. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1711>
- Rizkianataa, B. I., & Arifin, F. R. C. (2024). Perluasan praktik pork-barrel dalam pemilu serentak 2024: Implikasi dan penegakan hukum. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.46874/tpk.v6i1.1359>
- Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantonio, I. C., & Vici, V. V. (2023). Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023), 1:2, 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/684>
- Said, M. F., & Yunas, N. S. (2025). Dynastic Politics and Party Persistence: Mechanisms of Elite Power Reproduction in Indonesian Democracy 2024 Elections. *Politicon*, 7(2), 251–278. <https://doi.org/10.15575/politicon.v7i2.44700>
- Samuels, D. J. (2002). 'Pork-barreling Is Not Credit Claiming or Advertising: Campaign Finance and the Sources of the Personal Vote in Brazil'. *The Journal of Politics*, Vol. 64, No. 3, .845-863. <https://gsdrc.org/document-library/pork-barreling-is-not-credit-claiming-or-advertising-campaign-finance-and-the-sources-of-the-personal-vote-in-brazil/>
- Setyawan, H. (2023, 4 Januari). 5 Politisi yang Pindah Partai Politik. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/5-politisi-yang-pindah-partai-politik-232663>
- Sugirman, A., Amir, I., Sutrisno, A., Fitryantica, A., & Bone, S. (2025). Balancing Individual Political Rights and Institutional Integrity in an Islamic Constitutional Perspective on Party Switching in Indonesia. *El-Mashlahah*, 15(2), 369–392. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.9995>
- Taufiqurrohman, M. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 128–143. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>